

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah dari perkembangan koperasi tentunya tidak terlepas dari adanya perkembangan sosialisme yang terjadi dimana perkembangan sosialisme tersebut ialah anti tesis dari kapitalisme, yang sudah berkembang sejak lama di Eropa. Keadaan kinerja kapitalisme di Eropa yang semakin memburuk yang menyebabkan kepincangan sosial sebagai akibat dari dianutnya sistem ekonomi kapitalis yang memberlakukan persaingan bebas dan monopoli berupa revolusi industri tahun 1770 yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin baru yang mampu menciptakan produk dengan jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang baik, namun dengan harga yang murah. Akan tetapi, pada kenyataannya persaingan bebas malah menciptakan suatu konflik kepentingan dimana karena konflik tersebut melahirkan berbagai bentuk eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi yang mengutamakan perolehan bagian pendapatan atas dasar kepemilikan kapital, sehingga pihak yang kaya (pemilik kapital) akan semakin kaya, dan yang miskin (buruh/pemilik industri rumah tangga) akan semakin miskin. Hal tersebut menyebabkan munculnya depresiasi ekonomi dimana industri rumah tangga gulung tikar serta jumlah pengangguran yang semakin tinggi dan tidak terkendali (Soedjono, 2007).

Adanya depresiasi ekonomi tersebut mendorong munculnya gerakan dari kaum yang berasal dari orang tertindas serta terpinggirkan akan tetapi memiliki kepedulian berupa idea tau gagasan untuk mendirikan koperasi yang tidak bertolak dari persaingan bebas namun kerja sama yang dilandasi semangat

kebersamaan. Kemudian kaum tersebut mempersatukan diri dengan tujuan untuk saling menolong serta turut mengembangkan kesejahteraan bersama baik kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat sekitarnya. Sehingga pada 12 Desember 1844 di Rochdale Inggris, ide atau gagasan awal untuk berkoperasi dapat direalisasikan yang dipimpin oleh Charles Howart. Melalui kerja sama yang berlandaskan kebersamaan, keadilan, serta kejujuran tersebut diharapkan akan mempertemukan kesamaan kepentingan, bukan memunculkan konflik kepentingan. Dengan mempertemukan kepentingan para anggotanya, maka pada akhirnya dengan berkoperasi dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang ideal yaitu kemakmuran yang adil dan merata (Soedjono, 2007).

Koperasi merupakan tulang punggung bagi perekonomian bangsa dimana hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang tertulis bahwa perekonomian dibentuk sebagai suatu usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan adalah usaha bersama yang sesuai di Indonesia. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu suatu badan usaha yang anggotanya berisi satu orang atau lebih. Badan hukum koperasi yaitu melandaskan dari setiap kegiatannya dengan didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan yang muncul dari ekonomi rakyat dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Pada pasal 3 sudah disebutkan bahwa tujuan dari berkoperasi yaitu memajukan kesejahteraan dari setiap anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Selain itu berkoperasi juga turut serta membangun suatu tatanan perekonomian nasional sebagai upaya atas perwujudan masyarakat yang adil, maju, serta makmur.

Koperasi akan menjadi wadah dalam upaya mengembangkan demokrasi ekonomi, menghimpun setiap potensi pembangunan yang bisa digali dari para anggota masyarakat serta pelaksanaan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya (Purwono, 2013). Koperasi ialah salah satu harapan yang bisa meningkatkan kesejahteraan serta harkat masyarakat dengan melalui kegiatan ekonomi tersebut dan bersumber dari serta dimanfaatkan untuk kalangan masyarakat itu sendiri.

Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk memupuk dan membangkitkan daya cipta serta prakarsa dari warga yang ada di dalam masyarakat itu. Salah satu caranya ialah dengan mengikutsertakan semua penduduk yang terdapat dalam masyarakat tersebut mau dengan sukarela turut serta berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan serta masing-masing penduduk ikut tergerak menyumbangkan baik bahan-bahan yang telah tersedia di daerahnya maupun menyumbangkan tenaganya (Priyono, 2013).

Kabupaten Sumenep merukan salah satu dari empat kabupaten di Pulau Madura yang memiliki jumlah koperasi terbanyak apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah data koperasi aktif dan tidak aktif yang ada di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep pada tahun 2017.

Tabel 1.1 Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep Tahun 2017

No	Jenis Koperasi	Bangkalan		Sampang		Pamekasan		Sumenep	
		Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)
1	KUD Pangan	8	1	5	3	11	2	15	0
2	KUD Mina	8	1	4	1	0	0	9	0
3	Kop. Pertanian	45	24	7	7	32	4	0	0
5	KPTR	5	0	3	0	0	0	0	0
7	Kop Peternakan	1	2	0	0	0	0	0	0
8	Kop Perikanan	16	4	3	0	6	0	0	0
9	Kopti	1	0	0	1	0	1	1	0
10	Koppontren	79	16	34	31	75	9	109	18
11	Kopinkra	3	3	0	3	1	1	1	0
12	KPRI	64	1	45	0	61	11	58	4
13	Kopkar	11	5	5	5	22	7	8	3
14	Kop AD	1	0	1	0	1	0	1	0
15	Kop AL	3	0	0	0	0	0	0	0
17	Kop Kepolisian	1	0	1	0	3	0	1	0
18	Kop Pepabri	97	28	0	1	0	1	1	0
19	Kop Wredatama	4	6	1	2	1	2	2	2
20	KSP	11	0	4	1	15	1	7	1
21	KJKS	1	0	1	0	0	0	9	0
22	Koppas	0	0	2	3	3	1	2	6
24	Kop Telkom	1	0	0	0	0	0	1	0
27	Kopwan	290	1	106	90	223	0	495	0
28	Kop Angkutan Darat	0	0	0	0	3	1	1	2
30	Kop Profesi	2	2	0	1	0	1	0	1
31	Kop Veteran	1	0	0	1	0	1	1	0
32	Kop Mahasiswa	1	0	0	1	3	0	2	0
33	Kop Pemuda	0	0	2	4	3	1	2	0
35	Kop PK Lima	0	2	1	1	1	0	0	2
36	Kop Jamu Gendong	0	1	0	0	0	1	0	0
37	KSU	0	0	5	21	52	1	13	3
38	Kop Lainnya	27	17	23	14	62	9	498	279
	Sub Lainnya	681	114	253	191	580	55	1237	321
39	Kop Sekunder	1	2	1	1	1	1	3	0
	Jumlah	1	2	1	1	1	1	1240	321
40	Kop Lintas Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bulan Ini	682	116	254	192	581	56	1239	321

Sumber: Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha Yang Dikelola Bulan September 2017 Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep

Berdasarkan tabel diatas, banyaknya jumlah koperasi aktif dan non aktif di kabupaten Sumenep menunjukkan adanya usaha dari Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Sumenep sebagai upaya memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang ada dengan melalui koperasi. Keberadaan suatu koperasi bukan hanya membantu mengatasi kesulitan perekonomian yang di alami penduduk. Tetapi adanya peningkatan jumlah anggota koperasi dan peningkatan jumlah unit koperasi juga memberikan dampak terhadap lingkungan desa itu sendiri (Agusta, 2014). Peningkatan jumlah unit koperasi di Kabupaten Sumenep tersebut menunjukkan sisi positif dari pembangunan. Hal tersebut karena adanya koperasi diharapkan dapat terjadi penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan penduduk dilingkungan koperasi tersebut.

Perempuan ialah salah satu unsur dari masyarakat yang memiliki peranan penting serta sentral dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Maka sudah sepatutnya perempuan diberi kesempatan ekonomi guna menjamin ketahanan dasar keluarga melalui peningkatan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut muncul berbagai permasalahan diantaranya yaitu sulitnya mendapat modal kerja/kredit, sulitnya pendaftaran usaha, kurangnya jaminan keuangan, teknologi, dan sebagainya. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi apabila perempuan berkelompok bersama sesama kaumnya yang salah satunya ialah melalui koperasi wanita.

Menurut Ratnasari (2013) menjelaskan bahwa koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan koperasi wanita sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa koperasi wanita yang cukup berkembang seperti Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya secara kuantitas dan kualitas

terjadi peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Eksistensi koperasi wanita di Indonesia cukup signifikan walaupun tidak banyak koperasi wanita yang besar, tetapi koperasi wanita mampu membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah nasional seperti, mengurangi pengangguran, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan dan mengatasi masalah gender (Siswoyo et al., 2012). Koperasi adalah wadah bagi wanita untuk perbaikan ekonomi keluarga, aktualisasi diri bagi kaum wanita. Wanita tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi koperasi telah membuktikan keunggulannya memberdayakan wanita sebagai pioner dalam membantu usaha mikro di wilayahnya. Oleh sebab itu koperasi wanita perlu ditumbuhkan dan didorong perkembangannya.

Mahmudah (2013) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan koperasi bukan hanya menguntungkan koperasi wanita yang bersangkutan, tetapi juga anggota koperasi wanita dan juga keluarga dan komunitas dimana koperasi wanita tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alasan berkaitan dengan: (1) peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan kemiskinan; (2) Kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam koperasi, pada tahun 2010 pemerintah provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi pendirian 8.506 koperasi wanita. Dalam pendirian koperasi wanita tersebut, pemerintah provinsi telah menyiapkan dana sebesar Rp 25 miliar. Dana itu

disiapkan khusus oleh Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo untuk tahun anggaran 2011 yang penyalurannya dikoordinasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Penyaluran bantuan keuangan untuk program tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga Provinsi Jawa Timur. Sasaran dari pendirian koperasi wanita, yakni terwujudnya peningkatan modal kerja bagi perempuan anggota kelompok atau koperasi dalam bentuk pinjaman, meningkatnya pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan anggota koperasi, dan meningkatnya taraf hidup keluarga anggota koperasi. Berbagai bantuan/fasilitasi yang diberikan dalam kegiatan ini diharapkan akan bermuara pada penciptaan Koperasi Wanita yang berkualitas, yang mampu menggerakkan perekonomian desa sehingga anggota koperasi maupun masyarakat sekitar dapat meningkat kesejahteraannya (Siswoyo et al., 2012).

Tabel 1.2 Profil Koperasi Wanita di Kabupaten Sumenep Tahun 2017

	2016	2017
Jumlah Koperasi	495	495
Jumlah Anggota	18.110	19.054
Modal Sendiri	35.982.875.233	38.362.390.224
Modal Luar	3.889.830.224	4.032.606.420
Volume Usaha	47.319.273.620	42.356.377.644
Kekayaan (Asset)	39.872.705.457	55.327.885.759
Sisa Hasil Usaha	3.711.563.018	4.116.639.427

Sumber: Rekapitulasi Data Koperasi Wanita Berdasarkan Kelompok Usaha Yang Dikelola Bulan September 2017 Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah anggota yang bergabung dengan Koperasi Wanita mengalami peningkatan yang kemudian diiringi dengan peningkatan jumlah modal sendiri, modal luar, Aset, dan SHU. Bentuk upaya meningkatkan fungsi dari Koperasi Wanita di Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Sumenep bukan hanya berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan kuantitas (jumlah) koperasi, tapi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas dari kinerja koperasi. Kualitas dari kinerja koperasi meliputi segi usaha serta segi kelembagaan koperasi. Jika dari segi usahanya, maka koperasi harus bisa meningkatkan daya saing koperasi terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar manfaat koperasi bisa dirasakan secara signifikan oleh seluruh masyarakat terutama anggota koperasi. Sedangkan segi kelembagaan meliputi kegiatan operasional dari koperasi dimana dalam kegiatannya tidak terlepas dari definisi, nilai, serta prinsipnya, karena ketiga hal tersebut adalah jatidiri koperasi yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya (Mahmudah, 2013).

Jatidiri koperasi ialah karakteristik khusus milik koperasi yang membedakannya identitas koperasi dengan pelaku ekonomi lain. Jatidiri ini menjadi suatu kekuatan dan keunggulan sendiri bagi gerakan koperasi (Darmawanto, 2015). Selain itu, koperasi sebagai suatu organisasi sosial-ekonomi dapat terlihat dari jatidiri koperasi tersebut. Jatidiri suatu koperasi tidak dapat muncul secara tiba-tiba, namun dengan mengalami berbagai proses panjang serta berkesinambungan yang terjadi selama kurang lebih satu setengah abad. Mohammad Hatta sebagai Bapak koperasi Indonesia mengatakan bahwa koperasi menjadi kuat dikarenakan cita-citanya, serta cita-cita koperasi bisa menjadi semakin kuat dikarenakan praktek-prakteknya.

Penjelasan diatas tersebut juga sama dengan jatidiri dari koperasi, dimana jatidiri koperasi akan semakin kaya serta utuh dikarenakan praktek-praktek perkoperasian yang dilaksanakan selama ini serta koperasi juga semakin kokoh dikarenakan jatidirinya. Hal tersebut dikarenakan jatidiri koperasi akan

menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya serta perbedaan tersebut harus diakui juga diterima. Secara berkala, pengkajian serta perumusan ulang jatidiri koperasi dilakukan oleh *International Cooperative Alliance (ICA)*. Pada saat pendirian ICA tahun 1895 di London, prinsip-prinsip dari koperasi yang dianut merupakan prinsip-prinsip dari koperasi Rochdale dimana prinsip tersebut telah disempurnakan pada saat kongres ICA yang dilaksanakan di Paris pada tahun 1937, kemudian di Wina pada tahun 1966, serta di Manchester pada tahun 1995. Perumusan dari jatidiri koperasi yang dilakukan oleh ICA pada saat Kongres di Manchester secara formal telah diberlakukan oleh seluruh koperasi yang ada di seluruh dunia (Darmawanto, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui peran wanita dapat tercipta apabila wanita diberi kesempatan untuk berusaha. Wanita sebagai pemain sentral dalam menjamin kesejahteraan keluarga maka sepatutnya untuk diberikan kesempatan berusaha guna menjamin ketahanan dasar keluarga melalui peningkatan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Solusinya ialah dengan menciptakan kelompok wanita yaitu berupa koperasi, karena diharapkan dengan melalui gagasan berkoperasi mampu membawa pembaharuan bagi kehidupan masyarakat dari masyarakat yang penuh akan kepincangan sosial atau ketidak-adilan dan keresahan sosial ke arah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, untuk mencapai arah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, suatu koperasi tentunya harus menerapkan jatidirinya. Jatidiri koperasi ialah karakteristik khusus milik koperasi yang membedakannya identitas koperasi dengan pelaku ekonomi lain. Apabila jatidiri koperasi baik, maka hal tersebut tentunya juga menunjukkan bahwa koperasi tersebut sehat dan anggota tentunya

juga merasakan manfaat dari bergabung dengan koperasi tersebut. Dengan penjelasan tersebut maka seharusnya apabila jatidiri koperasi dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan koperasi termasuk dalam pembuatan kebijakan dan kegiatan operasional disetiap koperasi maka seharusnya ditandai dengan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut tentang kinerja koperasi wanita yang berbasis jatidiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja koperasi wanita berbasis jatidiri yang ada di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja koperasi wanita berbasis jatidiri yang ada di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat kepada pemerintah yaitu memberikan sumbangan rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam upayanya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakatnya terutama melalui koperasi.

Manfaat kepada masyarakat adalah memberikan motivasi dan wawasan bagi masyarakat pedesaan untuk bekerja sama dalam meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi daerahnya melalui koperasi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bagi kalangan akademisi yaitu untuk menambah wawasan dan mengungkapkan kebenaran yang ada di lapangan saat ini apakah sesuai dengan teori ekonomi modal sosial dan tindakan kolektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan serta berhubungan dengan rumusan masalah skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang merupakan dasar penulisan skripsi, rumusan masalah yang memerlukan jawaban penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab yang terdapat dalam penulisan ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada. Bagian selanjutnya tinjauan kepustakaan terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya kerangka pemikiran penelitian yang menjelaskan awal mulanya teori yang mendasari penelitian sampai aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan keabsahan data, analisis data, pengujian keabsahan hasil penelitian, dan fokus penelitian dalam skripsi ini.

Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini membahas secara rinci inti dari penulisan ini yaitu mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh serta hasil dari pengolahan data tersebut. Bagian-bagian dari bab ini meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis dan pembahasan.

Bab 5 Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna berdasarkan hasil pembahasan skripsi.

Daftar Pustaka

Lampiran